PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN (STUDI TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI KECAMATAN BUKIT KEMUNING)

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh :

Sri Ramayanti
NPM. 1731040079

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

FAKULTAS USHULUDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443/ 2022

PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN (STUDI TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI KECAMATAN BUKIT KEMUNING)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh:
SRI RAMAYANTI
NPM. 1731040079

Prodi : Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si
Pembimbing II: Abdul Qohar, M.Si

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H \ 2022M

ABSTRAK

PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN (STUDI TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI KECAMATAN BUKIT KEMUNING)

Oleh
SRI RAMAYANTI

Pada tahun 2007 Pemerintah telah menerbitkan Program untuk penanggulangan kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan tunai diberikan kepada keluarga miskin yang memenuhi persyaratan dengan tujuan memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih ada beberapa anak yang putus sekolah karena tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan sekolah, kesehatan ibu hamil dan balita yang tidak dipedulikan dan masyarakat masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara kepada informan yang dipilih dengan teknik *snowball sampling*. Kemudian penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Merilee S. Grindle sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui manfaat Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Bukit kemuning dan untuk mengetahui Implementasi Peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Kecamatan Bukit Kemuning.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini jika diliat dari Program Keluarga Harapan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat menuai banyak manfaat untuk masyarakat penerima PKH di Kecamatan Bukit Kemuning, ada beberapa manfaat dari program PKH untuk masyarakat penerima PKH dilihat dari aspek pendidikan, dengan adanya PKH dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun, aspek kesehatan dimana meningkatkan kualitas kesehatan yang mewajibkan peserta untuk memeriksakan kandungannya dan balita secara rutin ketempat pemeriksaan yang telah disediakan dan aspek ekonomi dapat meringankan kebutuhan pokok penerima PKH. Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan bukit kemuning sudah berpatokan kepada peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018. Dan sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terbukti dengan rutinnya pemberian bantuan ini kepada Keluarga Penerima baik dalam bentuk barang maupun uang yang akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Keluarga Penerima PKH berdasarkan Komponen seperti komponen Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial dapat memenuhi kebutuhannya.

Kata kunci : Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan, Implementasi.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp: (0721) 780887

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul	:	**Program Keluarga Harapan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Kecamatan Bukit Kemuning)**
Nama	:	Sri Ramayanti
NPM	:	1731040079
Program Studi	:	Pemikiran Politik Islam

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyahkan Dan Dipertahankan Dalam Seminar Munaqosah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 2022

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si	**Abdul Qohar, M. Si**
NIP. 197503172003121003	**NIP: 197103122005011005**

Mengetahui,
Ketua Program Studi PPI

Abdul Qohar, M. Si.
NIP: 197103122005011005

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
Alamat: Jl. Letkol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp: (0721) 780887

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Program Keluarga Harapam dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Kecamatan Bukit Kemuning)** , NPM: **1731040079**, Program studi: **Pemikiran Politik Islam**. Telah di ujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Agama UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Senin, 20 Juni 2022 pukul 10.00-11.30 WIB.

TIM PENGUJI

Ketua	**: Dr. Suhandi, M.Ag**	(.....)
Sekretaris	**: Dwi Rosmawati, S.Tr.Keb., M.Kes**	(.....)
Penguji Utama	**: Drs. Agustamsyah, M.I.P**	(.....)
Penguji Pendamping I	**: Dr. Ali Abdul Wakhid, M.SI**	(.....)
Penguji Pendamping II	**: Abd. Qohar, M.SI**	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Agama

Dr. Ahmad Isnaeni, MA
NIP. 197403302000031001

MOTTO

كَادَ ٱلْفَقْرُ أَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا

Artinya : *Hampir saja kefakiran (kemiskinan) itu menjadi kekufuran.*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan senantiasa bershalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW,dengan ini penulis persembahkan hasil penulisan skripsi kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Kamrus Zaman dan Ibu Dessy Surya yang senantiasa kusayangi dan kubanggakan dalam keadaan apapun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tuaku, karena berkat doa dan usaha beliaulah langkah demi langkah yang penulis tempuh senantiasa dipermudah oleh Allah SWT, hingga sampai akhirnya penulis mampu menyelesaikan studi S1 di Uin Raden Intan Lampung. Semoga mereka selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa dilimpahkan keberkahan atas setiap langkahnya yang tulus dan ikhlas. Tidak ada kata-kata yang bisa mengukur rasa terimah kasihku atas segala yang diberikan.
2. Ayuk yang sangat kubanggakan Desska aprianti. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan doa yang senantiasa menyertai setiap jengkal langkah usahaku.
3. Adik Adik terkasih dan tersayang Andika Adi Nata dan Farrel Artawan Azhar yang sangat kucintai. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan doa yang senantiasa menyertai dalam segala hal dan menjadi motivasiku untuk berhasil.
4. Nyai Dan Nenek yang sangat kubanggakan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan doa yang senantiasa menyertai setiap jengkal langkah usahaku.
5. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungannya.
6. Teruntuk Almamater Uin Raden Intan Lampung dan Fakultas Syariah yang kucintai dan sangat kubanggakan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 03-01-1999 di Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan Dari pasangan suami istri bernama Bapak Kambrus Zaman dan Ibu Dessy Surya. Penulis dianugerahi Nama Sri Ramayanti yang artinya adalah seorang putri yang lahir dibulan Ramadan tangal tiga Januari yang diberikan langsung oleh kedua orang tua tercinta. Riwayat pendidikan yang telah penulis selesaikan, diantaranya sebagai berikut:

1. TK Pertiwi Darma Wanita Bukit Kemuning 2005
2. SD N 05 Bukit Kemuning 2011
3. SMP 01 Bukit Kemuning 2014
4. SMA N 1 Bukit Kemuning 2017
5. Penulis melanjutkan pendidikan S1 di Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2017 dengan mengambil jurusan Pemikiran Politik Islam di Fakultas Ushuludin. Penulis juga perna mengikuti Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) Di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuing Kabupaten Lampung Utara dan mengikuti PKL di DPRD Kota Bandar Lampung.

Bandar Lampung, 13 Maret 2022
Yang Membuat

Sri Ramayanti
1731040079

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Terwujudnya skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana sosial dalam Program Studi Pemikiran Politik Islam Strata 1 (S1) pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Univeristas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Peneliti menyadari bahwa terselasainya skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa petunjuk maupun saran, langsung maupun tidak langsung terutama pada lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung maka pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D, selaku dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, M.A selaku dekan fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Abdul Qohar M.Si. selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan juga pembimbing II saya yang senantiasa memberikan kemudahan kepada mahasiswa.
4. Bapak Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si. selaku pembimbing I saya yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Citra Wahyuni M.Si. selaku sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang turut membantu dalam proses kelancaran skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen Jurusan Pemikiran Politik Islam dan seluruh pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahun kepada peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
7. Seluruh staff administrasi dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan baik dalam proses penyelesaian skripsi.
8. Kepada seluruh narasumber yang telah berbaik hati meluangkan waktunya untuk penelitian ini, dari pihak Koordinator PKH, Pendamping PKH, dan Penerima PKH di kecamatan bukit kemuning kabupaten lampung utara
9. Seluruh teman tercinta Pemikiran Politik Islam A angkatan 2017 yang senantiasa membersamai dalam setiap langkah perjuangan.
10. Seluruh teman KKN tahun 2020 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara

11. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa dicantumkan satu persatu yang telah membantu memberi arahan dan memberi dukungan.
12. Dan terima kasih untuk diri sendiri sudah membuktikan bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semoga atas bantuan dan jerih payah semua pihak menjadi ibadah disisi Allah SWT.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, april 2021
Penulis,

Sri Ramayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
ABSTRAK.....ii
PERSETUJUAN.....iii
PENGESAHAN.....iv
PERNYATAAN ORISINALITAS v
MOTTO vi
PERSEMBAHAN.....vii
RIWAYAT HIDUP.....viii
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI.....xii
DAFTAR TABLE.....viii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR LAMPIRAN.....x

BAB I PEDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....1
B. Latar Belakang Masalah 2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 5
D. Rumusan Masalah.....5
E. Tujuan Penelitian.....5
F. Manfaat Penelitian 5
G. Kajian Penelitian Terdahulu 6
H. Metode Penelitian 8
I. Kerangka teoritik 13

BAB II PROGRAM KELUARGA HARAPAN, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, PERATURAN MENTERI

A. Landasan Teori
   1. Program Keluarga Harapan
      a. Pengertian Program Keluarga Harapan 14
      b. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan.....15
      c. Hak Dan Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan 15
      d. Mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan 16
   2. Kesejahteraan Masyarakat
      a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat.....16
      b. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat 18
      c. Fungsi Kesejahteraan Masyarakat.....18
      d. Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam.....19
   3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH
      a. Pengertian Peraturan Menteri.....20
      b. Pelaksanaan Peraturan Menteri 21

c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan 21

BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA

A. Sejarah Pembentukan Kecamatan Bukit Kemuning
   a. Letak Geografis.....23
   b. Kondisi Topografis 24
   c. Lingkungan.....25
   d. Keadaan Demografi 26
   e. Ekonomi Masyarakat 29
   f. Visi Dan Misi.....29
B. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Bukit Kemuning

BAB IV PKH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA TANJUNG BARU

1. ManfaatProgram Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Bukit Kemuning 39
2. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dikecamatan Bukit Kemuing..... 51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....57
B. Rekomendasi 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Informan. 10

Tabel 2. Luas wilayah berdasarkan lingkung kelurahan 24

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan KK 26

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Agama 27

Tabel 5. Jumlah Sarana Peribadatan 27

Tabel 6.Jumlah Jiwa Berdasarkan Tingkat Pendidikan 28

Tabel 7. Jumlah Sarana Pendidikan.....28

Tabel 8. Data Peserta Penerima PKH 34

Tabel 9. Dana Bantuan PKH 34

Tabel 10. Syarat dan Sasaran PKH.....40

Tabel 11. Kewajiban peserta PKH.....44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Teoritik.....13

Gambar 2. Mekanisme Pelaksanaan PKH.....32

Gambar 3. Perkemangan PKH Tahun 2007 S.D 2020.....40

Gambar 4. Anak Putus Sekolah Tahun 2020.....42

Gambar 5. Nilai Bantuan Yang Diterima Dalam 1 Tahun.....55

Gambar 3.1 Wawancara Dengan Bapak Alexander 86

Gambar 3.2 Wawancara Dengan Bapak Dedi Sulaiman 86

Gambar 3.3 Wawancara Dengan Ibu Risnani.....86

Gambar 3.4 Wawancara Dengan Ibu Yunani 87

Gambar 3.5 Wawancara Dengan Ibu Nisa 87

Gambar 3.6 Wawancara Dengan Ibu Wira.....87

Gambar 3.7 Wawancara Dengan Ibu Rahmayati.....88

Gambar 3.8 Wawancara Dengan Ibu Lia Maryana 88

Gambar 3.9 Wawancara Dengan Ibu Wika 88

Gambar 3.10 Wawancara Dengan Ibu Rahma 89

Gambar 3.11 Wawancara Dengan Ibu Reni 89

Gambar 3.12 Wawancara Dengan Ibu Suryani 89

Gambar 3.13 Wawancara Dengan Ibu Suliswati 89

Gambar 3.14 Wawancara Dengan Ibu Lespita 89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman wawancara 61

Lampiran 2. Daftar pertanyaan wawancara 63

Lampiran 4. Dokumentasi 85

Lampiran 5. Surat-surat.....90

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah utama dalam penulisan skripsi, penulis akan memberikan penegasan judul :**"Program Keluarga Harapan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Kecamatan Bukit Kemuning)"**

Mempertegas istilah-istilah yang terdapat pada judul diatas secara terperinci agar mudah dimengerti, dan untuk memberikan penjelasan dalam memahami maksud judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu menguraikan definisi istilah yang terdapat dalam judul tersebut. Hal ini selain untuk lebih mudah memahami, juga untuk mengarahkan pada maksud penelitian yang dikehendaki oleh penulis. Berikut ini istilah-istilah yang terdapat dalam judul, akan diuraikan sebagai berikut :

1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT), ini terbukti cukup berhasil dengan menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di Negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.[1]
2. Peningkatan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti kata peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatan (usaha, kegiatan, dsb). Jadi peningkatan adalah lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan, peningkatan berarti kemajuan, penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik.[2]
3. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara yang mengandalkan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak dan kewajiban manusia sesuai dengan pancasila. Kesejahteraan diartikan dengan persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan.[3]
4. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup disuatu daerah tertentu, yang telah cukup lama, dan mempunyai aturan aturan yang mengatur mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama.[4]
5. miskin adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan

---

[1]Kementerian Sosial, 'Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021', *Kementerian Sosial Republik Indonesia*, 2021, p. 76.

[2]meaty taqdir qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (jakarta: badan pengembangan dan pembinaan, kementerian pendidikan dan kebudayaan, 2011), p. 560.

[3]Joko Tri Prasetya, *Ilmu Budaya Dasar Cet Ke III* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2004), p. 36.

[4] Joko Tri Prasetya, *Ilmu Budaya Dasar* Cet Ke III (Jakarta; Rhineka Cipta, 2004), p.36.

kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan atau tingkat kemiskinan atau jumlah orang hidup di bawah garis kemiskinan.[5]

Maka berdasarkan pengertian komponen kata-kata dalam judul skripsi ini dapat disimpulkan sebagai tercapainya kesejahteraan masyarakat yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat dan mampu mengembangkan diri serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya melalui bantuan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Bukit Kemuning.

B. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia secara tegas dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum. Salah satu penghambat terwujudnya kesejahteraan umum adalah kemiskinan. Maka tidak heran Negara setiap tahunnya meningkatkan jumlah anggaran untuk program-program dan usaha-usaha pengentasan kemiskinan.Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan sama tuanya dengan manusia itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia.[6] Kemiskinan juga merupakan permasalahan yang dihadapi oleh hampir semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, namun lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang disebabkan karena kondisi pembangunan yang masih belum stabil.

Kemiskinan adalah masalah multidimensi yang didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Kemiskinan di sebut-sebut juga sebagai pangkal munculnya berbagai masalah sosial. Masyarakat miskin menjadi kekurangan dan tidak mampu dalam menghadapi perkembangan di zaman globalisasi seperti saat ini. Dengan adanya kemiskinan maka akan menghambat tujuan dan cita-cita suatu negara. Pada dasarnya masyarakat miskin memiliki kelemahan dalam kemampuan mencukupi kebutuhan hidup serta kemampuan berusaha dan terbatasnya akses terhadap kegiatan sosial ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi.[7] Kemiskinan ditandai dengan rendahnya kualitas hidup masyarakat, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan aspek lainnya. Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang dapat membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan masyarakat. Bahkan dalam islam rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Na'im :

---

[5] Yani Afdillah, Isnaini Harahap, Marliyah, *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan Pada Masyarakat Tebing Tingg*i, (Medan: Febi UIN-SU Press, Cetakan Pertama, 2015, p.48.

[6] Wildana Wargadinata, *Islam Dan Pengetasan Kemiskinan*, UIN Maliki (Malang, 2011), p. 13.

[7] Dyah Ayu Virgoreta dkk, *"Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Bije Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban*) " (dalam jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya), p. 1.

كَادَ ٱلْفَقْرُ أَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا

Artinya :*Hampir saja kefakiran (kemiskinan) itu menjadi kekufuran.*

Islam menganggap sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan ini merajalela, maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama manusia lainnya.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program sosial yang juga di kenal di dunia Internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang di hadapi di negara–negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Sebagai sebuah program bantuan bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama bagi ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagi fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia disekitar mereka, manfaat PKH juga mulai di dorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial yang di berikan pemerintah untuk menjangkau masyarakat kalangan kelas ekonomi kebawah program ini di realisasikan dengan memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM). Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan sosial ekonomi masyarakat miskin maka pemerintah mengeluarkan beberapa trobosan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat,[8] salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan.

Misi besar Program Keluarga Harapan untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia Berdasarkan data BPS pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,54 juta. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2020 sebesar 7,38 persen, naik menjadi 7,88 persen pada September 2020. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2020 sebesar 12,82 persen, naik menjadi 13,20 persen pada September 2020[9].

Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara merupakan lokasi yang di jadikan objek dalam tulisan ini. Adapun sasaran pelakasanaan Program Keluarga Harapan meliputi Kecamatan Bukit Kemuning Petani, Pedagang, dan Buruh yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakatnya yang masih banyak keluarga miskin. Sebanyak 23,28 persen atau 139.422 dari 598.892 total penduduk Lampung Utara masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka penduduk miskin ini berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung.

[8] Https://Kemensos.go.id (Dakses Pada Tanggal 29 agustus 2021 jam 23:37)
[9]Badan Pusat Statistic, Persentase Penduduk Miskin Maret 2020

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten ini mencapai sekitar 23 persen dari total penduduk.

Hasil survey yang di lakukan oleh kementrian keuangan pada bulan September 2017 yang lalu, bahwa bantuan sosial jenis PKH ini memiliki dampak yang signifikan pada penurunan angka kemiskinan serta ketimpangan, oleh karena itu pengentasan kemiskinan melalui PKH ini menjadi prioritas pemerintah Indonesia, sekaligus menjadi program andalan sebagai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, dukungan kementerian seperti: Ketenagakerjaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan sehingga upaya pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan tersebut dapat di wujudkan.[10]Masyarakat miskin adalah masyarakat yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Atau yang di sebut juga masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan ialah kurangnya kesejahteraan, apabila seseorang kekurangan kesejahteraan maka dia dalam kemiskinan.[11]

Rendahnya penghasilan menyebabkan keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, bahkan untuk tingkat minimal sekalipun. Jika ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, maka hal ini akan berakibat pada buruknya kondisi kesehatan dan asupan gizi bayi yang ada dalam kandungan ibu tersebut dan mempengaruhi kesehatan si bayi pada saat lahir nanti. Masalah ekonomi masih menjadi salah satu persoalan penting dalam proses pendidikan formal. Apabila perekonomian suatu keluarga kurang bagus maka proses pendidikan juga menjadi terhambat. "*anak saya putus sekolah karena saya tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan anak saya membantu saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari hari*. Ujar rahmayati (55 tahun)[12]

Berdasarkan hasil penelitian terkait Program Keluarga Harapan diKecamatan Bukit Kemuning. Penulis menemukan bahwa penduduk Kecamatan Bukit Kemuning mayoritas berpropesi sebagai petani dan buruh, ini membuktikan banyak masyarakat tidak dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya karena masih ada beberapa anak dari keluarga manfaat yang seharusnya duduk dibangku sekolah tapi tidak sekolah dan kesehatan anak yang tidak diperdulikan orang tua. Sehingga masyarakat yang di tetapkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan belum bisa memanfaatkan PKH tersebut dengan baik dan efisien sehingga adanya PKH belum mampu mensejahterakan masyarakat khusunya di Kecamatan Bukit Kemunig dan penulis ingin mengetahui implementasi peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 di Kecamatan Bukit Kemuning sudah diterapkan apa belum. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :**"Program Keluarga Harapan Dan Peningkatan Kesejahteraan**

[10]'Jurnal of Public Sector Innovation', 3 no 2 (2019), 2 (p. 68).

[11]mapatta, *Buku Penunjang Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial*, CV budi ut (yogyakarta, 2017), p. 202.

[12] Wawancara dengan ibu Rahmayati Warga Kecamatan Bukit Kemuning

Masyarakat Miskin (Studi Tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Kecamatan Bukit Kemuning)

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan fokus dan sub fokus dalam penelitian ini yaitu :

1. Fokus penelitian

   Fokus dalam penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan dan Implementasi peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Bukit Kemuning.

2. Sub fokus penelitian

   Adapun beberapa sub fokus dalam penelitian ini adalah :

   a. Manfaat Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diKecamatan Bukit Kemuning. terdiri dari :
      1. Pendidikan
      2. Kesehatan
      3. Kesejahteraan sosial

   b. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan diKecamatan Bukit Kemuning. terdiri dari :
      1. Penerapan
      2. Peran peraturan PKH
      3. Tujuan Peraturan Mentri Sosial Nomor tentang Program Keluarga Harapan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dibahas dalam penelitian ini maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Bukit kemuning ?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan mentri sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bukit Kemuning ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Adapun beberapa tujuan dari penelitian proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Bukit kemuning
2. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Kecamatan Bukit Kemuning

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini memberikan deskripsi pengembangan kepada dua wilayah yang berbeda, yaitu:

a. Manfaat Teoritis
   1. Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan kesejahteraan masyarakat miskin.
   2. Bagi peneliti baru, diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.
b. Manfaat Praktis
   1. Bagi pemerintah, diharapkan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam hal pengambilan kebijakan yang menyangkut peningkatan peran pemerintah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di kecamatan Bukit Kemuning kabupaten Lampung Utara.
   2. Bagi masyarakat, sebagai sumber informasi bahwasanya program keluarga harapan (PKH) dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian tentang Program Keluarga Harapan (PKH) mendorong beberapa orang melakukan penelitian terhadap hal tersebut pada masa lalu. Agar terhindar dari plagiarisme maka penulis akan melampirkan penelitian terdahulu diantaranya adalah:

1. Penelitian Kartiawati yang berjudul "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)" menjelaskan bahwa belum efektifnya program ini dikarenakan masih ditemukan kurang tepat sasaran dalam penentuan peserta PKH selain itu kurang efektifnya pengalokasian dana PKH oleh peserta membuat PKH menjadi tidak tepat guna dan tidak sesuai dengan tujuan program PKH, sehingga PKH belum dapat mengurangi/mengentaskan kemiskinan yang ada di Kampung Bonglai.[13]
2. Penelitian Fiolita Nur Wulandari yang berjudul : "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus".Penelitian Ini Menjelaskan Bahwa Pelaksaan Program Keluarga Harapan (PKH) Serta Efektivitas Perogram Keluarga Harapan (PKH) Bagi Masyarakat.[14]
3. Penelitian Monica Martilova yang berjudul : "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara". Penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana pelaksanaan program PKH

[13]Kariawati, 'Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam', *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2017, p. 108.

[14]N W Fiolita, 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam PeningkatanKesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Banjarmasin Kecamatan …', 2021, p.22.

memberikan bukti nyata dalam pelaksanaan program PKH di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.[15]

4. Penelitian Dyah Ayu Virgoreta, Ratih Nur Pratiwi dan Suwondo yang berjudul "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)" telah disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) mensyaratkan peserta PKH untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan agar dapat meningkatkan taraf kesehatan secara optimal. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa setiap tahunnya jumlah peserta PKH di Desa Beji mengalami penurunan. Terbukti dengan menurunnya jumlah peserta PKH dari 158 pada tahun 2007 dan menurun dari tahun ke tahun sampai pada tahun 2014 ini dengan jumlah 130. Hal ini membuktikan dengan adanya bantuan PKH tersebut setidaknya akan mengurangi angka kemiskinan[16].
5. Penelitian Kadek Dina Indriani yang berjudul "Analisis Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Buleleng Tahun 2011-2015" mengungkapkan bahwa ketepatan sasaran penerima Program Keluarga Harapan khususnya dalam dimensi kesehatan dan pendidikan menunjukkan bahwa sudah tepat sasaran dengan hasil pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Buleleng tahun 2011-2015 yang menunjukkan hasil 14.364 yang dikategorikan cukup baik terutama hasil dalam bidang pendidikan dan kesehatan yakni 4.980 dan 3.762 dengan keadaan peserta Program Keluarga Harapan berdasarkan besaran bantuan, tingkat usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, pekerjaan dan pedapatan masyarakat yang masih dikategorikan kurang, maka dari itu pemberian dana Program Keluarga Harapan dalam dimensi kesehatan dan pendidikan sudah tepat sasaran, yang nantinya diharapkan jumlah penerima bantuan dana Program Keluarga Harapan dapat berkurang tiap tahunnya dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan Program Keluarga Harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Buleleng mampu memberi konstribusi yang serius dan signifikan dalam upaya membantu keluarga sangat miskin, dengan adanya Program Keluarga Harapan ini masalah pendidikan dasar, kesehatan dasar, bahkan tingkat penghasilan keluarga dapat diperhatikan, dilihat dari penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 32% dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Buleleng bersumber dari data BPS Kabupaten Buleleng[17]

Dari beberapa penelitian diatas menjelaskan bahwa diberlakukannya Program Keluarga Harapan (PKH) pada setiap wilayah memiliki pengaruh yang

---

[15]Monica Martilova, 'Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara', *Skripsi UIN Raden Intan Lampungdy*, 2019, p. 18.

[16] Dyah Ayu Virgoreta, dkk., Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.2, Nomor 12, Universitas Brawijaya, 2014, p. 4.

[17]kadek dina indriani, 'Analisis Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Buleleng', *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 10 nomor 2 (2017), 9.

berbeda-beda. Begitu pula dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan mengkaji manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Bukit Kemuning tentu penelitian ini akan memperoleh hasil berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara yang dilaksanakan seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisis fakta yang ada di tempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan, hal ini dilakukan untuk menemukan kebenaran.[18]Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research)* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.[19] Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu. Sedangkan metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.[20]

Penulis mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelitian untuk memaparkan fenomena alamiah yang terjadi berdasarkan teori yang ada. Oleh karena itu, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk memaparkan dan mendeskripsikan tentang Program Keluarga Harapan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Bukit Kemuning.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sempel yang telah dikumpulkan peneliti sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Penelitian deskriptif analisis menitik beratkan pada observasi dan setting alamiah.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan

[18]Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramed (jakarta, 2010), p. 13.
[19]sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&d*, alfabeta (bandung, 2013), p. 209.
[20]sugiono, p. 8.

yang diteliti. Data ini diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) atau kuesioner penelitian.

Pada penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti dalam pengambilan sampling menggunakan metode *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambil sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar[21]. Hal ini dilakukan karena dari jumlah data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain yang bisa sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.[22] Dalam penelitian ini, sumber data primernya yaitu warga Kecamatan Bukit Kemuning yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping PKH dan koordinator PKH.

b. Data sekunder

sekunder yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain, misalnya berupa dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang masih berkaitan dengan materi penelitian.[23]

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi (*observation*)

Observasi merupakan suatu proses yang komplek, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai observer partisipasi aktif, jadi peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh responden, tetapi belum sepenuhnya lengkap.[24] Dalam penelitian ini metode observasi digunakan agar pokok permasalahan dapat diteliti secara langsung di Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[25]Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang dianggap relevan dengan penelitian ini, terutama yaitu penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bukit Kemuning. Agar wawancara lebih valid peneliti merekam hasil wawancara untuk keperluan pengolahan data. Mekanisme wawancara dilakukan dengan cara wawancara terarah (*guided interview*) yang dilakukan secara individual yakni wawancara

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RZZ&D*, p. 8.
[22]Tim Febi Iain walisongo semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, basscom(semarang, 2014), p. 19.
[23]tim FEBI IAIN walisongo semarang, p. 20.
[24]sugiono, p. 227.
[25]sugiono, p. 231.

peneliti dengan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bukit Kemuning. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1.

Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Alexander	Koordinator PPKH
2	Dedi Sulaiman	Koordi Kec. Bukit Kemuning
3	Risnani	Pendamping
4	Suhada	Pendamping
5	Rahmayati	Peserta PKH
6	Yunani	Perserta PKH
7	Suliswati	Perserta PKH
8	Lia Maryana	Perserta PKH
9	Suryani	Perserta PKH
10	Rika	Perserta PKH
11	Nisa	Perserta PKH
12	Wira	Perserta PKH
13.	Reni	Perserta PKH
14.	Rahma	Perserta PKH

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti. Dimaksudkan untuk menambah atau memperkuat apa yang terjadi dan sebagai bahan untuk melakukan komparasi dengan hasil wawancara, sejauh ada dokumentasi yang bisa diperoleh di lapangan.[26] Dalam penelitian ini yang digunakan dengan mengumpulkan data-data dokumen atau arsip yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang ada di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, yang meliputi letak geografis, struktur perangkat desa, buku-buku, arsip atau dokumen-dokumen lainnya.

4. Analisis Data dan Penyajian Data

a. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif deskriptif. Analisa data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Peneliti akan mengumpulkan data dan fakta objek untuk menganalisa bagaimana Program Keluarga Harapan dalam meningkatan Masyarakat Miskin dan implementasi Permensos nomor 1 tahun 2018 di Kecamatan Bukit Kemuning. Data dan fakta yang didapatkan

[26]Uhar suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*, PT. refika (bandung, 2012), p. 208.

dikumpulkan, diinterprestasikan, dan dianalisis sehingga dapat memberi gambaran pada objek yang peneliti teliti[27].

Setelah berbagai sumber didapatkan, maka peneliti mengolah data-data tersebut dengan cara deskriptif-analitis. Maksudnya peneliti berusaha menganalisis secara kritis apakah semua sumber tersebut memang benar adanya, baik secara normatif maupun empiriknya. Sehingga nantinya penyajian karya tulis ilmiah dapat disajikan dengan apik dan matang untuk memudahkan pembaca atau yang lainnya dalam memahami karya tulis ilmiah ini[28].

Menurut Sugiyono proses analisis data dilakukan dengan beberapa langkah. Mulai dari pra-riset sebelum ke lapangan menggunakan data sekunder, kemudian observasi langsung pada penelitian untuk memastikan dan mengumpulkan data yang valid selain data sekunder, hingga seleksi dari berbagai data yang dikumpulkan untuk diuraikan dalam rangka penyajian hasil riset yang layak dan sesuai kepada pembaca.

b. Penyajian Data (Data Display)

Dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dsb. Namun, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Berikut tahapan dalam analisis data:

1) Data Reduction (Reduksi Data)

Adalah teknik analisis data dalam bentuk merangkum, mengambil hal-hal yang perlu/penting, dikerucutkan pada hal-hal yang utama/pokok, menentukan tema dan polanya. Data yang direduksi tadi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila perlu. Untuk itu peneliti melakukan reduksi data yang diambil dari lapangan terkait Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Bukit Kemuning

2) Penyajian Data.

Merupakan bentuk analisis yang mengubah atau menyederhanakan data setelah data digolongkan dan dipecah-pecahkan menjadi kelompok-kelompok. Kemudian dilakukan penyajian data sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian. Selain itu juga, mengadakan penyajian pada data mentah berarti mengubah data mentah tersebut dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk yang dapat dengan mudah memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena, sehingga data-data mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan.

[27]sugiono, p. 246.
[28]sugiono, p. 433.

3) Conclusion Drawing/Verifaction (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ke-tiga dalam analisa data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awalyang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang lebih kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berubah deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

I. Kerangka Teoritik

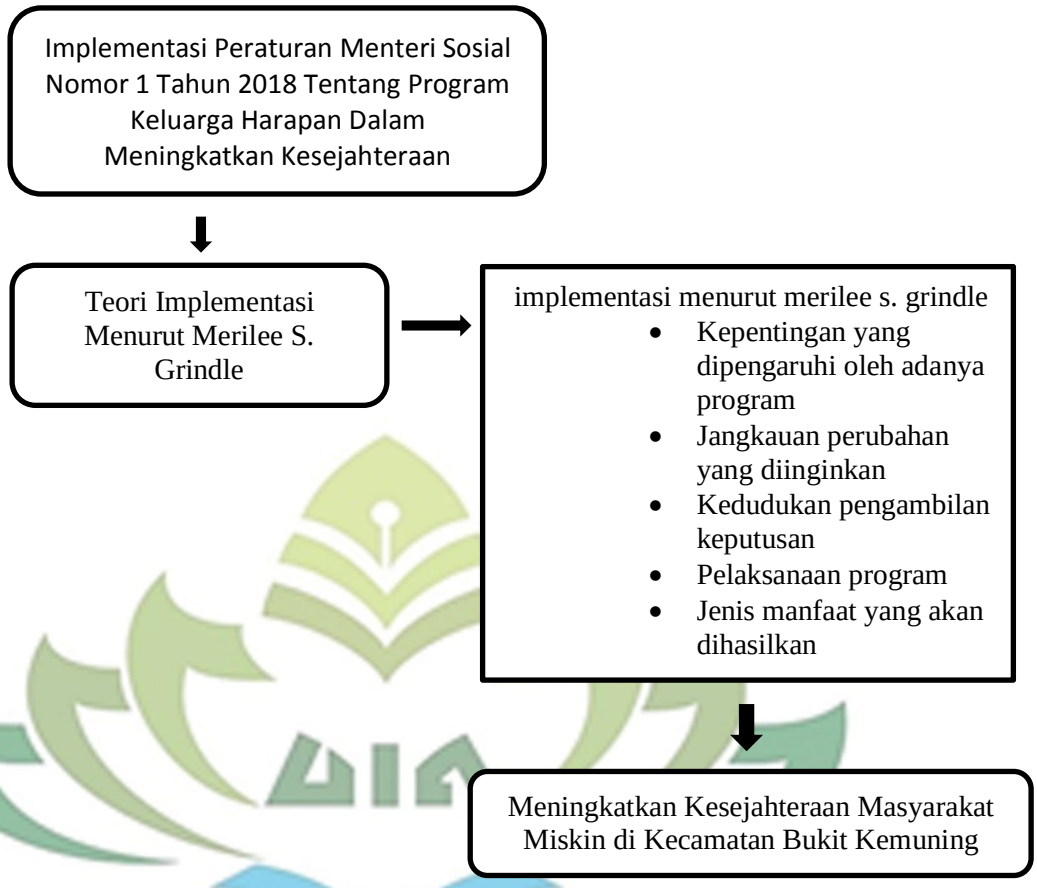

Implementasi sutau program dapat dijalankan oleh kemampuan operasional dalam menyelenggarakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh menurut Merilee S. Grindle . Diharapkan dengan menggunakan teori tersebut dapat mengetahui implementasi peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan dalam meningkatkan masyarakat miskin.

BAB II
PROGRAM KELUARGA HARAPAN, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PERATURAN MENTERI

A. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Keluarga Harapan

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap programdijelaskan mengenai:

a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
e. Strategi pelaksanaan.[29]

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk diopersionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan. *A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives"* (suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integraft untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan.[30]

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik.[31]

Menurut Permensos No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Program Keluarga Harapan dijelaskan didalamnya yaitu program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT),bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang dihadapi oleh negara-negara tersebut terutama masalah kemiskinan. PKH sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat membuka akses untuk rumah tangga miskin terutama pada kesehatan ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan layanan pendidikan yang tersedia. PKH juga bermanfaat dan mendorong untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial.[32]

---

[29]http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29235/Chapter%20II.pdf;jsessionid=892D5CF5A85999741266DED510181337?sequence=3. (Di akses pada 12Desember 2021)

[30]*Ibid.*

[31]*Ibid.*

[32]Kementerian Sosial.

Berdasarkan peraturan Kementrian Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 dapat dikatakan bahwa pemberian bantuan sosial adalah satuan kerja pada kementrian/lembaga pada pemerintah pusat dan/satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, pelayanan dasar.

Dengan demikian, Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan sebagai upaya membangun perlindungan sosial kepada rumah tangga miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi jumlah kemiskinan yang terjadi selama ini.

2. Kriteria Penerima PKH

Peserta Program Keluarga Harapan adalah keluarga penerima manfaat (KPM) yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu:

a. Kriteria kategori kesehatan meliputi :
   1. Ibu hamil/menyusui/ibu nifas/anak balita
   2. Memiliki anak usia 0-5 tahun 11 bulan

b. Kriteria kategori pendidikan meliputi :
   1. Memiliki anak SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun)
   2. Memiliki anak SMP/MTs/Paket B/ SMLB (usia 12-15 tahun)
   3. Memiliki anak SMA/MA atau sederajat

c. Kriteria kategori kesejahteraan sosial meliputi :
   1. Lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh tahun)
   2. Penyandang disabilitas diutamakan penyadang disabilitas berat

Ketiga Kriteria Penerima Bantuan PKH tersebut hanya harus terpenuhi salah satu atau lebih. Namun bukan berarti setiap keluarga yang dianggap sangat miskin yang memiliki salah satu atau lebih kriteria tersebut berhak mendapat bantuan PKH. Jika sebelumnya mereka tidak masuk dalam daftar calon penerima PKH, maka mereka tidak akan divalidasi. [33]

3. Hak dan Kewajiban Peserta PKH

Keluarga penerima Program Keluarga Harapan berhak mendapatkan :

a. Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program
b. Mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
c. Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas sinergritas penanggulangan kemiskinan lainnya.
d. Bagi lansia diatas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

[33] Peraturan Menteri Sosial RI, *NO. 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan*

Agar dapat memperoleh bantuan tunai, Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalamkegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak.

Keluarga penerima Program Keluarga Harapan berkewajiban mendapatkan :

a. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak usia 0 sampai 6 tahun.
b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, dan
c. Mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas berat.[34]

4. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Perencanaan
b. Penetapan calon peserta PKH
c. Validasi data calon penerima manfaat PKH
d. Penetapan keluarga penerima manfaat PKH
e. Penyaluran bantuan sosial PKH
f. Pendamping PKH
g. Peningkatan kemampuan keluarga
h. Verifikasi komitmen keluarga penerima manfaat PKH
i. Pemutakhiran data keluarga penerima manfaat PKH
j. Transformasi kepersertaan PKH

B. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”, sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa sanskerta “catera” yang berarti payung. Dalam kontek ini kesejahteraan yang terkandung dalam arti payung adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan ketakutan atau kekahwatiran sehingga hidupnya aman dan tentram baik lahir maupun batin.[35]Sedangkan menurut Poerwodarwinto, sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya. Adapun kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup).[36]

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.[37] Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan

[34]*Ibid*.
[35]Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Adi (Bandung, 2012), p. 8.
[36]rohiman notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, amzah (jakarta, 2016), p. 36.
[37]Badan Pusat Statistik 2007

jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.[38]

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.[39]

Mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut dilaksanakan berbagai upaya, program dan kegiatan tersebut "Usaha Kesejahteraan Sosial" baik yang dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang No.11 Tahun 2009 bagian II pasal 25 juga menjelaskan secara tegas tugas serta tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang meliputi :

a. Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraansosial.
b. Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial
c. Melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
d. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yangmenyelenggarakan kesejahteraan sosial
e. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.[40]

Arthur Dunham dalam Sukoco mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan,penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial.

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.[41]Tahapan-tahapan kesejahteraan menurut Abraham Meslow bahwa kesejahteraan sosial meliputi beberapa aspek yang diperoleh secara bertahap dan berturut-turut, seperti:

a. Terpenuhinya kebutuhan fisik atau kebutuhan pokok seperti pangan,sandang,papan, pendidikan dan kesehatan.
b. Kebutuhan akan rasa aman
c. Kebutuhan sosial

[38]rambe, *Kesejahteraan Sosial*, rajawali g (jakarta, 2004), p. 20.
[39]UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2
[40]Undang-undang No.11 Tahun 2009 bagian II pasal 25
[41]Bappenas, 2000

d. Kebutuhan akan pengakuan
e. Terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri.[42]

2. Tujuan kesejahteraan masyarakat

Tujuan kesejahteraan dapat dicapai secara seksama, melalui teknik-teknik dan metode tertentu dengan maksud untuk memungkinkan individu, kelompok maupun masyarakat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah penyesuaindiri mereka terhadap perubahan pola-pola masyarakat, serta melalui tindakankerja sama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial.[43]

Menurut Friendlander, tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk menjami kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak. Selain itu, untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga Negara lainya, peningkatan drajat harga diri setinggi mungkin, kesehatan berfikir dan melakukan kegiatan tanpa gangguan sesuai dengan hak asasi seprti yang dimiliki sesamaanya.[44]

Sedangkan menurut Adi fahrudin, tujuan kesejahteraan sosial ialah:

a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainyastandar kehidupan pokok seprti sandang, papan, pangan, kesehatan,dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya, misalnya dengan menggali sumbersumber,meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.[45]

3. Fungsi Kesejahteraan Masyarat

Fungsi kesejahteraan sosial menurut Adi Fahrudin bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.[46] Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain :

a. Fungsi pencegahan
   (Preventive)Kesejahteraan sosial ditujukan untukmemperkuat individu, keluarga,dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalammasyarakat transisi, upayapencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatanuntuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial sertalembaga-lembaga sosial baru.
b. Fungsi Penyembuhan (Curative)
   Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi kondisi ketidak mampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitas)

---

[42]Naerul Edwin, *Kontruksi Sistem Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, IAINpurwak, 2017.

[43]rohiman notowidagdo, p. 37.

[44]rohiman notowidagdo, p. 40.

[45]adi fahrudin, p. 10.

[46]adi fahrudin, p. 12.

c. Fungsi pengembangan (Development)
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbanganlangsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan ataupengembangantatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi penunjang (Supportive)
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapaitujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.[47]

4. Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam

Al-qur'an menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan diantara istilah-istilah itu yang cakupan maknanya luas dan mendalam serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah "alfalah" yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia.[48]

Secara bahasa perkataan "al-falah" berarti keberuntungan, kesuksesan dan kelestarian daam kenikmatan dan kebaikan. Sementara itu, Ar-raghib menjelaskan bahwa perkataan al-falah dalam kosakata Al-Qur'an mengandung dua makna, duniawi dan ukhrawi. Secara harfiah perkataan al-falah berarti mendapatkan atau memperoleh keberuntungan.

Al-falah dalam konteks keduniaan ditandai dengan keberhasilan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dengan memperoleh segala hal yang menyebabkan kehidupan ini baik dan menyenangkan dengan berkesinambungan, berkecukupan dan bermartabat. Al-falah dalam konteks kehidupan akhirat dibangun diatas empat penyangga` yang *Pertama* kebahagiaan kekal abadi tanpa mengalami kebinasaan, *Kedua* berkecukupan tanpa mengalami kefakiran, *Ketiga* kemuliaan tanpa mengalami kehinaan, *Keempat* pengetahuan tanpa mengalami kebodohan, sehingga dapat dirumuskan tidak ada kehidupan yang sempurna kecuali kehidupan di akhirat.[49]Sebagaimana dinyatakan dalam Al-qur'an surat Al- Ankabut:64,

artinya:"dan tidaklah kehidupan dunia ini melaikan senda gurau da mainmain. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebernarnya kehidupan, kalau mereka mengetahuinya" (QS. Al- Ankabut: 64)

Kesejahteraan umat Islam merupakan tujuan poko, kesejahteraan meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia.[50] Kesejahteraan yang dibangun Al-Qur'an berdiri diatas lima pilar utama yakni terpenuhinya kebutuhan fisik-psikologis, kebutuhan intelektual, kebutuhan emosi, kebutuhan spiritual, kebutuhan sosial. Kelima kebutuhan ini memiliki dimensi lahir batin serta terpijak pada realitas kehidupan yang menjadi landasan, motif dan perjuangan untuk mengembangkan kualitas kehidupan dunia, tetapi tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan fisik-biologis atau kehidupan kebendaan yang berhenti

[47]adi fahrudin, p. 13.
[48]usman ismail, *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial*, PT. grafin (jakarta, 2007), p. 1.
[49]usman ismail, p. 2.
[50]M. umer Chapra, *Islam Pembangun Ekonomi*, gema insan (jakarta, 2000), p. 6.

pada dimensi waktu dan tempat.[51] Kualitas hidup yang menjadi indicator tingkat kesejahteraan yang ditawarkan Al-Qur'an tercermin pada QS. Al-Baqarah: 201

artinya,"dan diantara merea ada yang berdoa: ya tuhan kami, berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan di akhirat dan periharalah kami dari siksa neraka" (QS. Al-Baqarah: 201)

Hakekat doa tersebut menegaskan bahwa kebaikan hidup didunia yang menjadi sumber Al-falah tersebut dengan landasan iman dan ibadah merupakan modal yang investasikan untuk kehidupan akhirat karena dalam pemandangan islam akhirat itu merupakan tempat untuk memetik dan dunia tempat menanam.

C. Peraturan Menteri

1. Pengertian Peraturan Menteri

Kementerian adalah menteri yang diangkat oleh kepala negara untuk kemudian kepadanya di serahkan suatu bidang jabatan yang dapat ia atur menurut kebijakannya sendiri dan ia dapat membuat keputusan– keputusan dengan ijtihad sendiri.

Menteri adalah pembantu presiden. Menteri menurut Undang– undang Dasar 1945 pasal 17, memimpin departemen pemerintahan. Jadi menteri membantu presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang–bidang tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi departemen, kenyataan selalu tidak begitu. Terdapat menteri yang tidak meminpin departemen, dalam praktek istilah "Menteri Negara". Justru menunjukkan menteri yang tidak memipin departemen, cukup disebut menteri. Penanaman menteri negarapun mengalami perkembangan. Menteri tanpa portofolio artinya menteri yang tidak memimpin departemen yang tidak membidangi tugas pemerintah tertentu. Menteri Negara semacam ini kita jumpai mislanya pada Kabinet pertama (1945).[52]

Pada saat ini, menteri negara meskipun tidak memimpin departemen tetapi menjalankan tugas pemerrintahan di bidang tertentu seperti Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga. Selain itu terdapat pula Menteri Koordinator (seperti Menko EKUIN) dan Menteri Muda (seperti Menteri Muda Keuangan). Terdapat juga jabatan yang diberi nama menteri seperti Menteri/sekretarsi keuangan.[53]

Dewan menteri atau cabinet adalah uatu alat pemerintahan yang timbulnya berdasarkan konvensi ketatanegaraan. Menurut Ismail Sunny, cabinet adalah pemegang kekuasaan eksekutif yan sesungguhnya, menteri– menteri itu tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai anggota kabinet dan dalam teori hukum *(legal theory)* mereka hanyalah *"servant of the crown".*kepada siapa kekuasaan eksekutif dibebankan.[54]

Konteks sistem pemerintahan presidensil, menteri–menteri diangkat dan di hentikan oleh presiden karena itu ia bertanggug jawab kepada presiden. Namun demikian, menteri–menteri Negara bukanlah pegawai tinggi biasa tetapi

[51]usman ismail, p. 3.
[52]philipus M. hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, p. 90.
[53]philipus M. hadjon dkk, p. 90.
[54]ismail suny, *Pengeseran Kekuasaan Eksekutif*, p. 48.

mempunyai pengaruh besar terhadap presiden dalam menentukan politik negara mengenai departemannya.[55]

Jadidapat di simpulkan peraturan menteri adalah departemen pemerintahan yang membantu presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang–bidang tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi departemen, yang di bentuk menteri dengan jenis perundang – undangan pada pasal 8 ayat (1) Nomor 12 tahun 2011 yang menyatakan di tetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan.

2.Pelaksanaan Peraturan Menteri

Pelaksanaan wewenang jabatan ini, meskipun wewenangnyaumum terkait dua syarat, yaitu: *Pertama*, khusus untuk menteri dia berkewajiban untuk memberikan laporan kepada kepala netgara tentang kebijakan yang telah ia buat dan tindakan yang ia laksnakan. *Kedua*, khusus kepala untuk kepala negara, ia berwenanguntuk memeriksa kegiatan para menteri dan kwbijakan–kebijakan yang telah ia buat,untik memberikan persetujuan apa yang tepat dan benar, serta mengoreksi apa yang tepat dana pa apa yang tidak benar karena pembuatan kebijakan bagi umat adalah wewenang Kepala Negara dan diserahkan kepada ijtihadnya.[56]

Jadi dapat di simpulkan diatas bahwa Peraturan Menteri merupakan Pengaturan yang (regeling), mengikat secara umum, norma perundang– undangan selalu bersifat umum, abstrak dan berlaku terus menerus.

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga harapan

Berdasarkan Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga harapan pada pasal 3 sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteran sosial.

Pada pasal 3 tersebut Kompenen–kompenen dari PKH mempunyai beberapa kriteria yang termuat dalam pasal 5 ayat 1,2 dan 3.

1. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
   a. Ibu hamil/menyusui; dan
   b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
   a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
   b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
   c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
   d.Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
   a. Lanjuut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan

[55]titik triwulan tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, p. 153.
[56]Imam Al-mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepimpinan Dalam Takaran Islam*.

b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.[57]

Berdasrkan Pasal 8 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan bahwa kelaurga penerima mamfaat PKH berdasarkan kriteria kompenen Kesejahteraan Sosial mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan kompenen yang berupa:

1. Memberikan makanan bergizi dengan memamfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (kali) dalam 1 (satu) Tahun.
2. Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makanan dengan makanan lokal bagi penyandang di sabilitas berat.[58]

Jadi dapat di simpulkan Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga harapan pada pasal 3 sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteran sosial. Yang diatur Pada pasal 3 tersebut tentang kompenen–kompenen dari PKH mempunyai beberapa kriteria yang termuat dalam pasal 5 ayat 1,2 dan 3. Sehingga mendapatkan kewajibannya sebagai penerima manfaat.

[57] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Pasal 3 tentang Program Keluarga Harapan.

[58] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Pasal 8 tentang Program Keluarga Harapan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Qodratilah, Meaty Taqdir. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar.* Jakarta: badan pengembangan dan pembinaan bahasa, kementerian pendidikan dan kebudayaan

Suharto, Edi. 2014. *membangun masyarakat memberdayakan rakyat.* bandung : relika aditama

Prasetya, Joko Tri. 2004. *ilmu budaya dasar* cet ke III. Jakarta; Rhineka cipta

Afdillah, Yani. dkk. 2015. *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan Pada Masyarakat Tebing Tingg*i. (Medan: Febi UIN-SU Press, Cetakan Pertama.

Wargadinata, Wildana. 2011. *Islam dan Pengentasan Kemiskinan.*Malang : UIN Maliki Press.

Mapatta, 2017. *Buku Penunjang Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial:* Yogyakrta: CV Budi Utama

Kontjaraningrat. 2010. *Metode Penelitian Masyarakat,* Jakarta: PT. Gramedia

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* Bandung : Alfabeta

Tim FEBI IAIN Walisongo. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Basscom Creative.

Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Bandung, PT. Refika Aditama

Tika, Mo Pabundu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis,* Jakarta: Bumi Aksara

Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan,. 2019. Kementrian Sosial Republik Indonesia

Fahrudin,Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama

Notowidagdo,Rohiman. 2016. *Pengantar Kesejahteraan Sosial,*Jakarta: Amzah

Rambe, *Kesejahteraan Sosial*, 2004 Jakarta: Rajawali

Ismail,Usman. 2007. *Al-qur'an dan Kesejahteraa Sosial*, Jakarta: Pt. Grafindo

Umer Chapra, M. 2000. *Islam Pembangun Ekonomi,* (Jakarta : Gema Insani press

Sumber Karya Ilmiah

Kartiawati, 2017. *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas FEBI. UIN Raden Intan Lampung : Lampung

Virgoreta, Dyah Ayu. 2014. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban,* Jurnal Administrasi Publik (JAP),Vol. 2 No. 12

Indriani, Kadek Dina. 2017. *Analisis Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Buleleng Tahun 2011-2015,* Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol 10, No 2

Rozi, Akhmad. 2011. *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Tanah Laut, FOCUS.* Universitas Lambung Mangkurat, Vol 1. No 2.

Jurnal of Public Sector Innovation, 2019. Vol 3, No. 2

Sumber Online

Https://Kemensos.go.id (Dakses Pada Tanggal 29 agustus 2021 jam 23:37)
Badan Pusat Statistic, Persentase Penduduk Miskin Maret 2020
http:// bukit kemuning.blogspot.com diakses pada 29 Desember 2021 Pukul 23.09 WIB.

Sumber Hukum

Peraturan Menteri Sosial RI, NO. 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan
UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2
Undang-undang No.11 Tahun 2009 bagian II pasal 25

Sumber wawancara

Bapak Alexander, wawancara dengan koordinator PPKH lampung utara, wawancara tatap muka, 24 januari 2022
Bapak dedi sulaiman, wawancara dengan koordinator bukit kemuning, wawancara tatap muka, 24 januari 2022
Ibu risnani, wawancara dengan pendamping PKH bukit kemuning, wawancara tatap muka, senin 25 januari 2022
Ibu yunani, wawancara dengan peserta PKH bukit kemuning , wawancara tatap muka, senin 25 januari 2022
Ibu nisa, wawancara dengan peserta PKH bukit kemuning, wawancara tatap muka, senin 25 januari 2022
Ibu wira, wawancara dengan peserta PKH bukit kemuning, wawancara tatap muka, senin 25 januari 2022
Ibu rahmayati, wawancara dengan peserta PKH bukit kemuning, wawancara tatap muka, senin 25 januari 2022
Ibu lia maryana, wawancara dengan peserta PKH bukit kemuning, wawancara tatap muka, senin 25 januari 2022
Ibu wika, wawancara dengan peserta PKH bukit kemuning, wawancara tatap muka, senin 26 januari 2022
Ibu suliswati, wawancara dengan peserta PKH bukit kemuning, wawancara tatap muka, 26 januari 2022
Ibu suryani, wawancara dengan peserta PKH bukit kemuning, wawancara tatap muka, 26 januari 2022

Ibu rahma, wawancara dengan peserta PKH bukit kemuning, wawancara tatap muka,2januari 2022
Ibu reni, wawancara dengan peserta PKH bukit kemuning, wawancara tatap muka, 26 januari 2022